



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT KERJA : UNIVERSITAS MULAWARMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUSTOFA AGUNG SARDJONO
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK
3. NHK : 630072

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 805.000.000

1. Tanah Seluas 705 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 204 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 337.000.000

1. MOTOR, HONDA REVO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOBIL, V.W.BEETLE SEDAN Tahun 1974, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
3. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.355.792.852**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 2.497.792.852**III. HUTANG** Rp. ---**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.497.792.852



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.